

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Korupsi merupakan masalah besar yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas oleh bangsa ini. Kalau dulu korupsi itu hanya dilakukan segelintir orang yang menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan, namun sekarang korupsi ikut serta dipraktekkan oleh bawahan-bawahan yang mana jabatannya sangat rendah. Dengan fakta ini menunjukkan bahwa kasus korupsi ini sudah begitu subur tumbuh di negeri kita ini. Ini menunjukkan betapa buruknya citra Indonesia di mata negara luar akibat dari perilaku pelaksana negara yang korup, yang mengeruk uang rakyat untuk kepentingan individu.

Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak luar biasa, menurut Transparency International (TI), Indonesia adalah Negara yang berada di wilayah ASEAN dengan peringkat 118 atau 4 (empat) negara terbawah dengan dampak korupsi yang sangat buruk. Perkembangan pemberantasan korupsi semakin meningkat dengan meningkatnya penanganan perkara korupsi dari segi kuantitas dan kualitas, yang tidak hanya fokus pada perkara dalam skala kecil, tetapi juga dalam skala besar dan berdampak luas. Namun, masih ditemui kendala dalam hal

rendahnya komitmen dan belum meratanya pemahaman di tingkat pusat dan daerah. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini masih menjadi permasalahan pokok. Dengan adanya elemen masyarakat dan dengan terbentuknya sebuah gerakan sosial menjadi peranan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang sama-sama diinginkan oleh kelompok atau dengan kata lain gerakan sosial adalah tindakan kolektif untuk mencapai keinginan yang menjadi cita-cita bersama. Gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang terbangun berdasarkan prakarsa masyarakat dengan tujuan untuk melontarkan tuntutan atas perubahan dalam institusi maupun kebijakan dari pemerintah yang dirasa sudah maupun tidak sesuai lagi dengan kehendak sebagian masyarakat.

Gerakan sosial lahir dari situasi dalam masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat. Dengan kata lain, gerakan sosial lahir dari reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Gerakan sosial merupakan gerakan yang lahir dari prakarsa masyarakat dalam menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan, atau struktur pemerintah.

Gerakan sosial melalui LSM di Indonesia telah banyak berdiri dan berfokus pada peningkatan *good governance* terutama dalam fungsinya untuk mengawasi praktik-praktik korupsi dan pelayanan publik, seperti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Indonesia Corruption Watch (ICW), KontraS,

Walhi, YLK, dan sebagainya (Sedarmayanti, 2012:5). Terbentuknya lembaga-lembaga yang berfokus pada praktik korupsi bukanlah tanpa alasan, hal ini disebabkan karena semakin maraknya praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) di Indonesia, bahkan sampai pada era reformasi saat ini.

Gerakan sosial melalui LSM juga muncul di berbagai daerah yang bergerak mengikuti kebutuhan dan juga kondisi akuntabilitas yang ada di daerah, salah satunya di Kabupaten Tasikmalaya terbentuk sebuah organisasi non pemerintah yang bernama Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) yang didirikan pada tanggal 09 Desember 2004 di Tasikmalaya. Di tengah tidak berjalannya reformasi 1998 di Tasikmalaya dengan implikasi semakin maraknya korupsi di sektor legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. KMRT merupakan sebuah LSM yang didalamnya terdapat mahasiswa dan masyarakat. KMRT bukan gabungan dari beberapa komunitas atau organisasi. KMRT diakui oleh pemerintah tetapi tidak pernah difasilitasi karena tugas mereka untuk mengkritisi pemerintah itu sendiri. Keberadaan KMRT bertujuan mewujudkan *good governance* dan mengembangkan partisipasi publik di Tasikmalaya. Korupsi telah mendistorsi kebijakan publik sehingga melahirkan buruknya kualitas layanan publik, kemiskinan, kebodohan dan ketidakberdayaan rakyat. KMRT bergerak dari tahun ke tahun KMRT ikut andil dalam menangani kasus kasus khususnya kasus korupsi yang ada di Tasikmalaya. Selain menggiatkan penindakan, dengan melaporkan para koruptor kepenegak hukum, KMRT juga melakukan pencegahan, dengan konsisten mengemban etika integritas Anti Korupsi, yang terangkum dalam Motto “Lihat Dengar Rasakan dan Lakukan !”. Selain aktif pada

gerakan Anti Korupsi KMRT juga bergerak di pemberdayaan masyarakat salah satu pencapaian terbesar KMRT yaitu memberdayakan masyarakat dengan membangun sarana pendidikan dan membangun kekuatan di daerah dengan membuat organisasi kepemudaan terbesar di Tasikmalaya. Pengalaman Pekerjaan atau Pelaksanaan Program yang dilaksanakan KMRT yaitu :

- 1) Melakukan penyelidikan kasus-kasus korupsi di eksekutif dan legislatif (2004-sekarang)
- 2) Melakukan advokasi non litigasi terhadap masyarakat kurang mampu yang terlibat masalah hukum dan peradilan (2004 – sekarang)
- 3) Melakukan jajak pendapat tentang Arah Pembangunan yang diinginkan masyarakat bawah di Tasikmalaya (Januari – September 2004)
- 4) Penguatan kapasitas masyarakat terpinggirkan dalam program KBMT (Kegiatan Belajar Masyarakat Terpadu) di Kampung Hanja Bojong Gambir (2008 – 2010).
- 5) Menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya “Otonomi Daerah” dengan peserta seluruh organisasi kedaerahan di Jawa Barat (2008)
- 6) Bekerjasama dengan Komisi Yudisial dalam Program Peradilan Bersih dan Monitoring Hakim Pengadilan Negeri di Tasikmalaya (2009 – 2010)
- 7) Melakukan Monitoring Kinerja Kejaksaan Se-Jawa Barat Tahun 2009 dan tahun 2010 kerjasama dengan ICW
- 8) Menjadi Fasilitator Pelatihan Perencanaan Anggaran Sekolah di Sumba Timur (NTT), Kota Muna (Sulawesi Tenggara) bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) (2011-2012)

- 9) Mendorong Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) yang Partisipatif di 6 sekolah dasar di Tasikmalaya bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) (2011-2012).

Dengan adanya KMRT kasus-kasus korupsi yang banyak terjadi di Tasikmalaya satu persatu terungkap, salah satunya kasus korupsi program dana hibah organisasi kemasyarakatan tahun anggaran 2017. Kasus yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tasikmalaya, Abdul Kodir. Jumlah tersangka aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 6 orang dengan kepangkatan berbeda-beda, sedangkan 3 lainnya wiraswasta. Kasus ini berawal adanya laporan masyarakat atas penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD tahun 2017 untuk instansi, organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan se-Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kegiatan belanja dana hibah tersebut, ada hibah untuk 21 yayasan keagamaan yang diduga diselewengkan oleh beberapa oknum yang terdiri dari ASN dan warga sipil sehingga menimbulkan kerugian negara.

Hasil dan sumbangsih yang telah diberikan oleh KMRT menjadi salah satu alasan penulis merasa tertarik dengan LSM ini. KMRT tidak hanya melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi di eksekutif dan legislatif saja, tetapi juga melakukan pendampingan (advokasi) non litigasi terhadap masyarakat kurang mampu yang terlibat masalah hukum dan peradilan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik dalam memandang permasalahan mengenai gerakan sosial anti korupsi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan mengawasi langsung kinerja pemerintahan dari usaha penyelewengan kekuasaan. Maka dari itu, penulis sangat tertarik dengan peran yang dimiliki oleh organisasi non pemerintah Koalisi

Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) sebagai bagian dari elemen *civil society* sekaligus organisasi penengah antara rakyat dan pemerintah melalui gerakan sosial anti korupsi di Kabupaten Tasikmalaya. Oleh sebab itu, guna mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai gerakan sosial LSM KMRT, maka penulis mengambil judul penelitian ini sebagai berikut : **“Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) sebagai Gerakan Sosial Anti Korupsi di Kabupaten Tasikmalaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan dalam sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana gerakan sosial Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) dalam menolak perilaku korupsi di Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gerakan sosial Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) dalam menolak perilaku korupsi di Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dibuat dengan harapan agar penelitian ini berguna bagi semua pihak, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menjadi referensi bagi mahasiswa dalam perkembangan

akademik khususnya mengenai gerakan sosial Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) dalam menolak perilaku korupsi di Kabupaten Tasikmalaya pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

2) Sebagai bahan acuan dan pijakan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi.

2) Bagi LSM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada LSM terkait untuk lebih memberikan kinerja yang maksimal terutama dalam fungsinya sebagai gerakan sosial Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) dalam menolak perilaku korupsi di Kabupaten Tasikmalaya.

3) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten agar lebih maksimal kinerjanya untuk menciptakan *good governance* di Kabupaten Tasikmalaya.

4) Bagi Mahasiswa

Diharapkan agar dapat memberikan pemahaman yang luas dan dapat menambah wawasan kepada mahasiswa terkait dengan konsep Gerakan Sosial, Korupsi, KMRT.

5) Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi dalam menambah kajian dan menjadi pembanding bagi yang menggunakan hasil penelitian ini.

6) Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan gerakan sosial Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) dalam menolak perilaku korupsi di Kabupaten Tasikmalaya.